

Peran transformatif perguruan tinggi Islam bagi kemajuan ilmu, kebudayaan dan peradaban di Indonesia

Abuddin Nata

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
nata@yahoo.com

Abstract

Indonesia is a country that has the largest number of Islamic universities in the world. Currently, there are fifty-eight state Islamic universities under the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, and thousands of Islamic universities under community (private) management. The presence of Islamic tertiary institutions in various forms and types has encouraged the birth of vertical and horizontal mobility of santri and rural communities to subsequently appear as a new middle class and social elite capable of occupying various strategic positions in government, private sector, and others. Through the role of Islamic university graduates, there has been a transformation of Islamic teachings in all aspects of life: social, economic, political, cultural, artistic, and so on. With this transformation, Islamic tertiary institutions have made a huge contribution to the realization of justice and prosperity, not only for Muslims themselves but for all Indonesian people and the world in general.

Keywords: civilization; culture; Islamic universities; science; transformation

Abstrak

Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah perguruan tinggi Islam terbanyak di dunia. Saat ini terdapat lima puluh delapan perguruan tinggi Islam negeri yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan ribuan perguruan tinggi Islam yang berada di bawah pengelolaan masyarakat (privat). Kehadiran perguruan tinggi Islam dengan berbagai bentuk dan jenisnya telah mendorong lahirnya mobilitas vertikal dan horizontal bagi kaum santri dan masyarakat perdesaan untuk selanjutnya tampil sebagai kelas menengah dan elite sosial baru yang mampu menduduki berbagai posisi strategis baik di pemerintahan, swasta dan lainnya. Melalui peran yang dilakukan oleh para lulusan perguruan tinggi Islam, telah berlangsung transformasi ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan: sosial, ekonomi, politik, budaya, seni, dan lain sebagainya. Dengan transformasi ini perguruan tinggi Islam telah memberikan sumbangan yang amat besar bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bukan hanya untuk orang Islam sendiri, melainkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya.

Kata kunci: Ilmu; Kebudayaan; Peradaban; PTI; Transformasi.

Diserahkan: 08-01-2023 **Disetujui:** 28-02-2023 **Dipublikasikan:** 28-02-2023

Kutipan: Nata, A. (2023). Peran transformatif perguruan tinggi Islam bagi kemajuan ilmu, kebudayaan dan peradaban di Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 84-100.
doi:<http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v12i1.9118>

I. Pendahuluan

Proses pendirian dan pembentukan perguruan tinggi Islam sesungguhnya sudah dirintis jauh sebelum kemerdekaan RI. Fuad Jabali dan Jamhari (2003) dalam *IAIN & Modernisasi Islam Indonesia* misalnya menginformasikan, bahwa betapa pun kurang berhasil karena intervensi Belanda, Dr. Satiman Wirjosandjoyo telah berupaya mendirikan Yayasan Pesantren Luhur sebagai pusat pendidikan tinggi Islam. Selanjutnya pada tahun 1940, beberapa guru Muslim mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Sumatera Barat, walaupun hanya bertahan hingga tahun 1942 saat Jepang mulai menduduki Indonesia. Upaya yang sama juga dilakukan oleh beberapa tokoh nasional terkemuka seperti Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, K. H. A. Wahid Hasyim dan K. H. Mas Mansyur. Pada tanggal 8 Juli 1945 mereka mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta di bawah pimpinan Abdul Kahar Mudazkir. Selanjutnya ketika revolusi kemerdekaan meletus, STI terpaksa ditutup dan dibuka kembali pada tanggal 6 April 1946. Pada tanggal 2 Maret 1947, STI itu berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan mengembangkan empat fakultas: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pendidikan.

Selanjutnya pada Fuad Jabali dan Jamhari (2003) dijelaskan bahwa selama tahun 1940-1950 pemerintah Indonesia yang berpusat di Yogyakarta bermaksud mendirikan dua perguruan tinggi, satu umum, dan satu lagi agama. Untuk yang umum pemerintah mengubah status menjadi negeri Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada yang kemudian namanya diganti dengan Universitas Gajah Mada (UGM). Sedangkan untuk yang agama pemerintah mengubah status menjadi negeri Fakultas Agama yang ada di Universitas Islam Indonesia (UII) yang kemudian dinamai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Pada tahun 1951, PTAIN telah memiliki tiga fakultas: Fakultas Tarbiyah, Qadha' dan Dakwah. Sementara Fakultas Pendidikannya yang ada di UII digabungkan ke UGM. Setelah PTAIN dikukuhkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 1957, Pemerintah juga mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta dengan Mahmud Yunus sebagai Dekannya dan Bustami A. Gani sebagai wakil Dekannya. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 1960, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 yang menggabungkan PTAIN dan ADIA dengan nama baru, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Yogyakarta dan Prof. Ir. H. A. Soenarjo ditunjuk sebagai Rektor dan dibantu oleh Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai Dekan Fakultas Syari'ah, dan Dr. Muchtar Yahya sebagai Dekan Fakultas Ushuludin yang berkedudukan di Yogyakarta. Sementara itu pada kesempatan yang sama dua fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah dengan Dekannya Prof. Dr. Mahmud Yunus, dan Fakultas Adab dengan Dekannya Prof. Bustami A. Gani dibuka di Jakarta.

Dalam rangka menanggapi aspirasi yang berkembang, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) melalui TAP-nya merekomendasikan IAIN untuk dikembangkan di beberapa daerah. Oleh karena itu, pada tahun 1963, IAIN yang

sebelumnya hanya berpusat di Yogyakarta dan Jakarta dikembangkan menjadi 18 fakultas tersebar di seluruh Negeri. Fakultas Tarbiyah didirikan di Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Banda Aceh; Fakultas Adab di Jakarta dan Yogyakarta; Fakultas Ushuluddin di Yogyakarta dan Jakarta; Fakultas Syari'ah di Yogyakarta; Banda Aceh, Banjarmasin, Palembang, Surabaya, Serang dan Ujung Pandang. Dalam merespons perkembangan IAIN yang pesat, Departemen Agama mengeluarkan keputusan penting Nomor 49 Tahun 1963 tentang peningkatan IAIN Yogyakarta dan Jakarta menjadi lembaga independen, Sejak saat itu, IAIN Yogyakarta di sebut IAIN Sunan Kalijaga dengan tugas mengkoordinasi seluruh fakultas di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Sementara IAIN Jakarta yang disebut IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkoordinasi seluruh fakultas IAIN di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera. Acara pembagian tanggung jawab wilayah tersebut dilaksanakan pada 18 Maret 1963 dalam sebuah upacara yang diselenggarakan Departemen Agama di Auditorium IAIN Jakarta di Ciputat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tanggal 5 Desember 1963 disahkan sedikitnya tiga fakultas menjadi satu IAIN, Berdasarkan keputusan tersebut, IAIN Jakarta menjadi mandiri; hal yang sama juga berlaku bagi IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 5 Oktober 1963; IAIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 22 Oktober 1964; IAIN Antasari di Kalimantan Selatan pada tanggal 22 November 1964; IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 6 Juli 1965; IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tanggal 28 Oktober 1965; IAIN Imam Bonjol Padang pada tanggal 21 November 1966; dan IAIN Sultan Taha Saefuddin Jambi pada tanggal 27 ? Tahun 1967. Selanjutnya lahir pula IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tanggal 28 Maret 1968, IAIN Raden Intan Lampung pada tanggal 28 Oktober 1968; IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 1 April 1979; IAIN Syarif Qasim Pekanbaru pada September 1970; dan IAIN Sumatera Utara di Medan pada tanggal 19 November 1973. Hingga tahun 1970, telah berdiri 13 AIN dengan 104 Fakultas.

Pada tahun 2002 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berubah menjadi Universitas Islam Negeri Jakarta. Setahun kemudian disusul oleh IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2003; IAIN Alauddin pada tahun 2004 dan hingga saat ini semua IAIN telah berubah menjadi UIN dengan jumlah fakultas yang diperkirakan mencapai ratusan. Kini sudah ada 17 UIN, 34 IAIN, dan 7 STAIN. Di samping itu terdapat 74 Universitas Islam Swasta, 32 Institut Agama Islam Swasta, dan 217 Sekolah Tinggi Islam Swasta. Terdapat sejumlah catatan menarik terkait perkembangan perguruan tinggi Islam tersebut sebagai berikut.

Pertama, bahwa dalam proses pendirian dan pembentukan PTI terjadi transformasi yang amat besar. Bermula dari Fakultas Agama yang ada di UII berubah menjadi PTAIN di Yogyakarta, kemudian bergabung dengan ADIA yang ada di Jakarta berubah menjadi

IAIN di Yogyakarta dengan empat fakultas, yaitu dua fakultas di Yogyakarta dan dua Fakultas di Jakarta, berkembang fakultas-fakultas di berbagai provinsi; dan dari fakultas berubah menjadi IAIN yang masing-masing berdiri sendiri di berbagai provinsi; dan dari IAIN kemudian berubah lagi menjadi UIN.

Kedua, bahwa perubahan dari Fakultas Agama, PTAIN, ADIA, dan IAIN berlangsung dengan amat cepat, yaitu selama lebih kurang 13 tahun, yakni dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1960. Perubahan agak melambat ketika dari IAIN menjadi UIN, yaitu sekitar 42 tahun. Antara tahun 47 sampai dengan 1960 adalah masa di mana konsolidasi NKRI belum benar-benar terbentuk dengan solid. Secara internal terdapat kekuatan Islam nasionalis, Islam ideologi Politik, sekularis komunis dan nasionalis/pemerintah. Kuatnya hubungan antara Islam nasionalis yang terdiri dari kaum santri yang tercerahkan dengan nasionalis pemerintah tampaknya menjadi faktor yang mempercepat pertumbuhan dan transformasi PT. Wahid Hasyim (1914-1953) yang menjadi Menteri Agama dalam tiga kabinet berturut-turut (1949-1952) tercatat sebagai Menteri yang memiliki perhatian besar bagi pendirian PTAIN.

Peran Wahid Hasyim dalam pengembangan sistem pendidikan di Indonesia perlu dikemukakan, karena sudah lama dinafikan para sarjana. Para sarjana umumnya mengatakan bahwa pengembangan pendidikan tinggi Islam dibangun oleh para tokoh modernis, seperti K. H. Ahmad Dahlan, pendiri pergerakan Muhammadiyah, dan Abdullah Ahmad pendiri sekolah Adabiyah di Minangkabau. Sebaliknya perubahan dan perkembangan institusi pendidikan Islam di kalangan tradisional hampir tidak pernah disentuh, meskipun ditemukan adanya persamaan di antara institusi pendidikan Islam tradisional dengan institusi yang dikembangkan oleh kaum modernis. Adalah Wahid Hasyim, pimpinan teras Nahdhatul Ulama yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan kaum muslimin di Indonesia, khususnya dari kalangan tradisional. Salah satu bentuk kepeduliannya adalah usahanya memperkenalkan ilmu pengetahuan dari barat ke pesantren dan mendirikan beberapa institusi pendidikan yang baru, misalnya Madrasah Nizamiyah, PGA (Pendidikan Guru Agama) dan PTAIN. Wahid Hasyim mencoba untuk memperbaiki kelemahan pendidikan umat Islam Indonesia dan mencoba membangun jembatan yang memisahkan dua sistem yang sudah berkembang saat itu, yaitu sistem Barat (sekolah), dan Islam (pesantren).

Selanjutnya K. H. Iljas melalui penetapan No. 1/1957 mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Ciputat. Selanjutnya melalui proses yang cukup kompleks, K. H. Wahib Wahab, melalui penetapan Presiden No. 11/1960 dan penetapan Menteri Agama No. 43/1969, berhasil memantapkan status pendidikan agama Islam tingkat universitas dengan menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi Institut Agama Islam Negeri yang berkedudukan di Yogyakarta dan Ciputat. Terkait dengan peran di antara Menteri Agama dalam pendirian PTAIN, Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.) (1989) dalam *Menteri-*

menteri Agama RI mencatat bahwa pendirian PTAIN ini merupakan salah satu peninggalan Wahid Hasyim yang paling penting. Dari sekitar 14 IAIN yang ada di seluruh Indonesia, ternyata mampu menyerap lebih dari 15 persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa Indonesia.

Tokoh lainnya yang memiliki peran besar dalam pengembangan PTAIN adalah KH. Saifuddin Zuhri (1919-1986) yang diangkat menjadi Menteri Agama selama kira-kira lima setengah tahun, yaitu sejak 2 Maret 1962 sd 11 Oktober 1967). Menurut Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.) (1998) dalam *Menteri-menteri Agama RI* ada dua alasan utama mengapa selama Menteri Agama KH Saifuddin Zuhri menaruh perhatian dan harapan begitu besar pada IAIN. *Pertama*, adalah rasa hormat, kagum dan penghargaan yang tinggi seorang santri terhadap tokoh-tokoh pendahulunya, yang dianggapnya telah menghasilkan karya besar bagi masa depan umat; *kedua*, masih terkait dengan yang pertama, adalah pandangannya terhadap posisi strategis IAIN sebagai jalan bagi operasionalisasi misi utamanya selaku Menteri Agama, yaitu mewujudkan agama sebagai unsur mutlak *nation building*. Di sisi lain, pada saat ini bangsa Indonesia juga masih belum selesai melakukan konsolidasi eksternal dalam rangka memperoleh pengakuan dunia internasional, serta pembebasan Irian Jaya. Masalah lainnya terkait dengan belum mantapnya NKRI, masih terbatasnya sumber daya manusia, keuangan, dan sebagainya. Namun sungguh pun dalam keadaan demikian, PTAIN dapat tumbuh berkembang dengan subur.

Ketiga, adanya pertumbuhan dan perkembangan PTAIN yang demikian cepat juga terkait dengan kemampuan tokoh-tokoh Islam membangun kerja sama yang baik dengan berbagai tokoh lainnya, bahkan dengan orang nomor satu, Presiden RI. Adanya perbedaan dari segi paham keagamaan seperti yang dianut Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, sebagaimana yang dianut para tokoh pendiri PTAIN itu tampaknya terkalahkan oleh ide besar untuk memajukan umat sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia. Dalam konteks ini kehadiran PTAIN tampaknya ingin menemukan titik persamaan daripada memperuncing perbedaan, dan fenomena ini penting diapresiasi dan dilanjutkan.

Keempat, pertumbuhan PTIN yang demikian cepat itu juga menunjukkan adanya pergeseran sikap eksklusif kepada sikap inklusif. Masing-masing kelompok Islam yang beragam tampak satu sama lain saling mendekat untuk mewujudkan agenda besar, yakni membangun ilmu, keberadaan dan kebudayaan Islami dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dengan cara membangun lembaga pendidikan tinggi. Dalam hubungan ini menarik apa yang dikatakan Sudirman Teba dalam *Islam Orde Baru* (1993:183-184) yang mengatakan, bahwa IAIN lahir dalam masa keruntuhan nilai-nilai lama. Lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan bukan saja mempertemukan antara santri dengan abangan, melainkan juga memberi kesempatan pada wong cilik yang

umumnya golongan santri untuk menaikkan status sosial mereka. Sebab mereka inilah yang kemudian menjadi pegawai, penguasa, peneliti, intelektual, wartawan, dan sebagainya pada masa Orde Baru. IAIN ini pada dasarnya tidak mewakili kelompok/golongan santri saja, karena kelompok abangan pun tidak sedikit masuk IAIN.

Meski begitu tidak berarti nilai-nilai lama sudah hilang sama sekali. Pada mulanya berdirinya, IAIN lebih banyak dimasuki oleh tamatan madrasah dan pesantren, yang wawasannya pun banyak dipengaruhi oleh alam pikiran pesantren yang tidak biasa mempertanyakan materi-materi kuliah yang diterima. Tetapi sejak akhir 1970-an dan awal tahun 1980-an terjadi perubahan besar di kalangan mahasiswa IAIN, khususnya Jakarta, yakni makin banyaknya lulusan SAM dan Madrasah yang mengikuti SKB 3 Menteri Tahun 1975 masuk IAIN. Biasanya sikap dan cara berpikir mereka lebih terbuka dan kritis. Hal ini tidak terbatas pada sikap kritis dalam wawasan keagamaan, tetapi juga pandangan mengenai hari depan mereka, Islam dan bangsa.

Kelima, terjadinya pertumbuhan dan perkembangan PTAIN juga tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan perjuangan kelompok Islam modernis, kultural dan inklusif terhadap kelompok Islam ideologis politik. Fakta ini dijumpai pada masa pemerintah Orde Baru yang berlangsung selama lebih kurang 32 tahun (1966-1998). Pada 16 tahun pertama hubungan Orde Baru dengan umat Islam pada umumnya kurang baik. Hal ini antara lain disebabkan masih adanya kelompok Islam ideologis politis yang ingin menghidupkan kembali ideologi Masyumi yang ingin menegakkan syariat Islam. Berbagai partai Islam yang ada pada saat ini masih bercorak ideologis. Keadaan ini rasa curiga antara umat Islam dan pemerintah masih belum sepenuhnya hilang. Dalam keadaan demikian, masih sering muncul gerakan yang cenderung ingin menjatuhkan pemerintah, dan karenanya pemerintah sering mengambil tindakan represif misalnya tentang penangkapan para dai, membredel surat kabar, terorisme, dan puncaknya pada peristiwa berdarah Tanjung Priok yang hingga kini tidak ada penyelesaiannya secara hukum.

Keadaan yang menguras tenaga, waktu, pikiran dan sebagainya tanpa hasil ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Sampai dengan tahun 1988 pendidikan Islam masih belum masuk ke dalam Sistem Pendidikan Nasional, anggaran pendidikan tinggi Islam amat rendah, mutu madrasah amat rendah, nasib guru madrasah, sarana prasarana pendidikan Islam lainnya umumnya tertinggal. Namun pada 16 tahun kedua, atau mulai tahun 80-an hubungan umat Islam dengan pemerintah mulai membaik. Islam ideologis politis mulai tergeser kiprahnya oleh Islam modernis, kultural dan inklusif yang antara lain dimotori oleh tokoh cendekiawan muda Nurcholish Madjid (Cak Nur). Pada waktu itu Cak Nur mengatakan "Islam Yes, Partai Islam No." Yakni Islam sebagai agama yang membawa misi kemajuan ilmu, kebudayaan dan peradaban silakan. Sedangkan Islam sebagai ideologi tidak perlu dikembangkan,

karena partai-partai Islam yang ada saat itu sudah tidak lagi dapat merepresentasikan cita-cita Islam. Dalam kaitan, para mahasiswa IAIN khususnya yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di mana Cak Nur sebagai idolanya menyebabkan IAIN berada pada barisan yang bergandengan tangan dengan Orde Baru. Keadaan ini diperkuat oleh gagasan Islam yang moderat dan toleran yang dikembangkan para dosen IAIN seperti Harun Nasution, menyebabkan kecurigaan pemerintah pada IAIN memudar. Dengan adanya sikap yang demikian menyebabkan sikap pemerintah terhadap umat Islam makin akomodatif.

Dody S. Truna dalam makalahnya "Islam dan Politik Orde Baru di Indonesia (1966-1990)" dalam *Pranata Islam* (2001) mengatakan bahwa sikap akomodatif ditujukan oleh pemerintah terhadap aspirasi umat Islam ketika pemerintah mengajukan RUU Peradilan Agama, RUU Sistem Pendidikan Nasional, dan ijin dari pemerintah bagi siswa perempuan untuk mengenakan jilbab, setelah dilarang untuk beberapa tahun. Sikap seperti ini bisa dilihat juga, umpamanya dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas keagamaan bagi masyarakat muslim seperti masjid, buku-buku agama, dan kitab suci al-Qur'an, serta membiayai aktivitas-aktivitas umat Islam seperti peringatan hari besar Islam, diskusi dan seminar, serta program sosial keagamaan lainnya. Seiring dengan itu Pemerintah juga menyetujui pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), pembukaan Bank Muamalat Indonesia, Festival Istiqlal, pendirian Penerbit Harun Umum Merdeka, dan lain sebagainya. Keadaan ini semakin membuka jalan dan menciptakan keadaan yang kondusif bagi pengembangan PTAIN.

Keenam, bahwa sebagai akibat dari keberhasilan PTAIN dalam menghasilkan lulusan yang memiliki gelar kesarjanaan, keilmuan dan kepemimpinan yang baik, mendorong mereka untuk mengembangkan perguruan tinggi Islam swasta melalui wadah-wadah organisasi, dan lembaga pendidikan dan kemasyarakatan di mana mereka pernah menimba ilmu darinya. Setelah tamat dari PTIN mereka ada yang kembali ke almamaternya ditambah dengan pendidikan lanjutan di dalam dan luar negeri, menyebabkan mereka berani untuk mendirikan perguruan tinggi Islam di almamaternya. Dengan demikian, maka bermunculannya perguruan tinggi Islam swasta yang jumlahnya lebih banyak daripada perguruan tinggi Islam Negeri. Fenomena menarik dan patut disyukuri, karena dengan cara demikian, semakin mempercepat proses transformasi dan mobilisasi umat Islam dalam mengangkat harkat dan martabatnya. Perguruan Tinggi Islam Swasta ini tersebar di berbagai provinsi dan berada di bawah pembinaan Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (Kopertais).

II. Misi Transformatif

John M. Echols dan Hassan Shadily (1970) dalam Kamus Inggris Indonesia, mengartikan transformasi dengan arti perubahan, pergantian, konstruk, mengubah

(bentuk), menyelaraskan, mengubah. Ketika dihubungkan dengan pendidikan, yakni pendidikan yang transformatif dengan meminjam bahasa Prof. Abdul Mu'thi (2003)(2020) adalah pendidikan yang dapat mengubah atau membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis, berani mengemukakan pendapat (*mindfull learning*), mampu menangkap makna dari segala sesuatu yang dipelajarinya (*meaningfull learning*), dan merasa tertarik dan senang dalam belajar (*joyfull learning*).

Fuada Jabali dan Jamhari (ed.) dalam *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*, mengemukakan sejumlah tokoh yang memiliki gagasan perlunya mendirikan Sekolah Tinggi Islam, yaitu M. Natsir, Satiman dan Mohammad Hatta. M. Natsir misalnya memang mengatakan bahwa pendidikan pondok pesantren dan madrasah memang dapat menghasilkan orang yang beriman dan berperilaku baik, tetapi acuh terhadap perkembangan dunia. Pada bulan Juni 1938, Natsir menulis sebuah artikel yang berjudul "Sekolah Tinggi Islam". Dalam tulisan tersebut, Natsir menekankan pentingnya STI menghasilkan kelompok intelektual yang memiliki basis pengetahuan keislaman dan kebudayaan yang kuat sebagai alternatif pendidikan ala Barat.

Sedangkan Satiman mengemukakan empat alasan perlu didirikannya STI. *Pertama*, kesadaran bahwa masyarakat Islam tertinggal dalam pengembangan pendidikan dibanding non-Muslim. *Kedua*, masyarakat non-Muslim maju karena mengadopsi cara Barat dalam sistem pendidikan mereka. *Ketiga*, perlunya menghubungkan sistem pendidikan Islam dengan dunia internasional. Keempat, dalam pendidikan Islam unsur lokal penting untuk diperhatikan. Sekolah Tinggi Islam diusulkan percis untuk menjawab keempat persoalan di atas. Sementara itu, keterlibatan Mohammad Hatta dalam pendirian STI, mungkin dimotivasi oleh cita-citanya untuk memadukan sistem pendidikan yang disebutnya "pendidikan masjid" dengan pendidikan umum. Dalam pandangan Hatta, pendidikan masjid memiliki kelebihan dalam mengajarkan nilai-nilai agama, namun lemah dalam pengetahuan umum. Sebaliknya sekolah umum mengonsentrasikan dirinya dalam pengembangan kemampuan rasio dan ilmu-ilmu umum (*sains*), Sementara itu mengacuhkan pendidikan agama, padahal agama memainkan peranan penting dalam "memanusiakan" umat. Karena itu, STI diharapkan dapat memperdalam rasa keberagaman seiring dengan perkembangan ilmu dan wawasan berpikir seseorang. Hatta berharap STI mampu menghasilkan para sarjana Muslim yang mengerti tentang masyarakat yang selalu berubah. Karenanya, jika mereka tidak memahami perubahan masyarakat di sekitarnya, maka mereka tidak layak memimpin. Alasan tersebut membuat filsafat, sejarah, dan sosiologi merupakan komponen-komponen yang sangat penting dimasukkan dalam kurikulum STI.

Azyumardi Azra (1999) dalam Pendidikan Islam, *Tradisi dan Modernisme Menuju Milenium* mengatakan tentang makna keberadaan Perguruan Tinggi Islam Negeri sebagai berikut. Pertama, menjadi pusat untuk mampu mengembangkan dan memperdalam ilmu

pengetahuan agama Islam; Kedua, mempertinggi tarap kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan kerohanian (spiritual dan ataupun dalam tarap intelektualismenya); Kedua, mampu memberikan respons dan jawaban Islam terhadap tantangan-tantangan zaman. Untuk itu Azyumardi menyarankan perlunya menciptakan iklim yang kondusif, suasana yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ide-ide segar berkenaan dengan pengamalan dan aktualisasi ajaran-ajaran Islam dalam abad modern ini. Selain itu juga perlu memberi bekal-bekal kepemimpinan dan intelektualitas yang teruji dengan integritas pribadi dan akhlak yang tinggi sehingga dapat diteladani masyarakat lainnya. Dengan cara demikian, PTIN dapat menjadi wadah penyiapan penafsir-penafsir Islam untuk kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat, serta mampu menempatkan dirinya pada tempat yang terhormat untuk kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia, dan minat masyarakat luas kian tertarik pada PTAI ini, cukup tinggi.

Pada bagian lain Azyumardi menambahkan bahwa alumni IAIN yang bekerja di berbagai lembaga itu umumnya mampu menunjukkan prestasi dan tidak kalah bersaing dengan alumni PT lainnya, terutama yang sama-sama bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, menunjukkan postur diri yang lebih intelektualitas dan kepercayaan diri. Namun demikian, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dihadapinya, terutama mutu ilmiah mahasiswa dan tenaga pengajar. Interaksi ilmiah dosen mahasiswa jauh daripada memuaskan. Masi banyak dosen yang belum berpegang pada standar-standar ilmiah, tetapi dan birokrasi dan feodalisme. Hal ini disebabkan karena penerapan sistem pendidikan *the banking concept of education* (pendidikan ala bank). Akibatnya daya kreativitas dan kreativitas intelektual mahasiswa terhalang. Demikian pula pola pikir pesantren di kampung, yang cenderung pasif.

Seiring dengan terjadinya transformasi kelembagaan dari institut menjadi universitas, maka visi, misi dan tujuan yang ingin diwujudkan pun mengalami transformasi dan pengembangan dari visi, misi dan tujuan sebelumnya. Ahmad Tafsir pada artikelnya "Pokok-pokok Pikiran Perlunya IAIN Dikembangkan Menjadi Universitas dalam Hadi Daeng Mapuna (ed.) (2005) *Dulu IAIN Kini UIN Alauddin* mengemukakan beberapa alasan mengapa IAIN dikembangkan menjadi Universitas adalah: untuk menghasilkan pemikir yang mampu berpikir komprehensif, agar ilmu agama dilengkapi dengan ilmu umum, menghilangkan dikotomi agama-umum, memenuhi harapan masyarakat, dan memenuhi lapangan kerja. Sementara itu Sarlito Wirawan Sarwono dalam artikelnya "Dari IAIN ke UIN" pada Hadi Daeng Mapuna (2005) mengatakan bahwa perubahan AIN menjadi UIN akan sangat strategis jika dasarnya adalah untuk menyatukan ilmu "sekuler" dan teologi Islam. Islam adalah agama "sekuler". Di zaman kejayaan Islam, "ulama" adalah ilmuwan yang malang melintang di segala bidang ilmu, bukan khusus di bidang agama saja. Perpaduan ilmu falak dan agama, bahkan tertera dalam al-Qur'an itu sendiri. Maka memisahkan lembaga pendidikan agam dari pendidikan umum merupakan awal yang keliru dalam perkembangan umat Islam.

Sementara itu Abuddin Nata (2012: 56-60) dalam *Manajemen Pendidikan* mengemukakan lima alasan perlunya perubahan IAIN menjadi UIN. *Pertama*, karena adanya perubahan jenis pendidikan pada madrasah dari yang semula hanya pendidikan agama, kini menjadi pendidikan umum yang berciri khas keagamaan. *Kedua*, adanya dikotomi ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. *Ketiga*, untuk memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi para lulusannya. Keempat agar para lulusannya dalam melakukan mobilitas vertikal yang lebih luas, yakni kesempatan dan peran untuk memasuki medan gerak yang lebih luas. Dan Kelima, untuk memenuhi tuntutan umat Islam yang selain menghendaki adanya pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan berkualitas tinggi, juga lebih menawarkan banyaknya pilihan.

Dengan demikian kehadiran PTAIN dengan berbagai perubahan dan dinamikanya yang demikian cepat, menyimpan harapan yang besar, luas, komprehensif, dan berjangka panjang. Selain untuk memajukan Islam sebagai agama Ilmu, kebudayaan dan peradaban, kehadiran PTAIN juga untuk memenuhi harapan masyarakat yang makin luas dan meningkat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan modernisasi, tuntutan dunia kerja yang memerlukan keahlian dan profesionalitas yang tinggi juga telah menjadi misi kehadiran PTAIN. Kemajuan umat Islam melalui PTAIN yang dikembangkannya selain akan mengatasi beban pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan sebagai amanat Undang-undang Dasar 1945, namun pada saat yang bersamaan juga akan membawa kemajuan.

III. Realisasi Misi Transformatif

Sejalan dengan terjadinya transformasi pada bentuk kelembagaan PTAIN, terjadi pula berbagai perubahan pada aspek-aspek pendidikan yang menjadi turunannya. Di antara yang menonjol adalah sebagai berikut.

Pertama, penambahan dan perubahan nomenklatur fakultas dan program studi. Setelah menjadi UIN terjadi penambahan dan perubahan nomenklatur fakultas. Penambahan terjadi dengan dibukanya fakultas-fakultas umum, seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan fakultas agama ditambahkan namanya menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas, Fakultas Adab dan Humaniora serta Fakultas Dirasah Islamiyah. Kecuali Fakultas Dirasah Islamiyah, nama fakultas-fakultas agama dikembangkan nomenklaturnya yang menggambarkan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Namun integrasi ini tampaknya baru sebatas nama atau nomenklatur sedangkan konten, substansi atau isinya masih belum terintegrasi.

Ilmu-ilmu umum yang diajarkan di fakultas-fakultas agama belum diintegrasikan dengan ilmu agama baik pada dataran ontologis, epistemologi maupun aksiologinya yang berbasis pada riset empiris (*burhani*), eksperimen (*ijbari*) dan logika bebas. Demikian pula ilmu-ilmu agama yang diajarkan pada program studi agama masih menggunakan ontologi, epistemologi maupun aksiologinya yang berbasis pada riset *bayani* dan *irfani*. Seharusnya ontologi, epistemologi dan aksiologi yang ada pada ilmu-ilmu agama digunakan untuk melengkapi ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu umum, demikian sebaliknya. Hal lainnya yang belum menggambarkan integrasi ilmu terjadi pada fakultas-fakultas umum yang baik dari segi nomenklatur maupun ilmu-ilmu yang diajarkannya belum terintegrasi.

Mata kuliah ilmu kedokteran yang diajarkan di Fakultas Kedokteran PTAIN misalnya sama dengan ilmu kedokteran yang diajarkan pada Fakultas Kedokteran PTU. Hal yang demikian didasarkan pada prinsip bahwa pada ilmu-ilmu sains integrasi ilmu tidak pada wilayah ontologi dan epistemologinya melainkan hanya pada wilayah aksiologinya. Hal ini menunjukkan bahwa misi integrasi ilmu yang digagas melalui perubahan IAIN menjadi UIN belum tuntas, dan masih membutuhkan upaya penjabaran yang lebih detail dan masuk pada wilayah kurikulum, nama-nama dan substansi mata kuliah, wawasan dan sikap keilmuan para dosen, dan sebagainya. Integrasi ilmu pada fakultas dan prodi umum selama diatasi dengan memasukkan mata kuliah tingkat universitas yaitu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, serta mata kuliah Studi Islam. Namun baik dari segi silabus, bahan ajar maupun dosen yang mengampu mata kuliah ini masih berjalan sendiri-sendiri dan belum ada benang merah yang mengintegrasikan antara semuanya.

Kedua, penambahan dan perubahan Program Studi. Sejalan dengan penambahan dan perubahan fakultas, terjadi juga penambahan dan perubahan pada Program Studi. Namun pada dataran ini nama-nama program studi baik dari segi nomenklatur maupun isinya belum menggambarkan integrasi ilmu. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Bahasa Arab dan lainnya yang ada sejak masih IAIN pada umumnya tidak mengalami perubahan. Desain kurikulum, nama mata kuliah, bahan dan kontennya yang ada pada masing-masing program studi tersebut tidak mengalami penambahan dan perubahan yang dibangun berdasarkan ontologi, epistemologi dan aksiologi integrasi ilmu.

Ketiga, pengembangan pendekatan dalam pembelajaran. Pada dasarnya pendekatan dalam pembelajaran tidak terlalu jelas perbedaannya dengan ketika bentuk PTAIN itu mengalami perubahan. Sebuah penelitian dan pengembangan yang terkait dengan transformasi pengembangan pendekatan dalam pembelajaran yang berbasis pada integrasi ilmu misalnya belum pernah dilakukan dan dirumuskan sebagaimana yang diharapkan. Pendekatan dalam pembelajaran banyak diserahkan sepenuhnya kepada dosen. Namun sejalan dengan semangat model pembelajaran dengan *scientific approach*

melalui *discovery* dan *inquiry learning* yang ditekankan pada kurikulum 2013, tampaknya banyak direspons oleh para dosen, khususnya dosen bidang studi umum, khususnya ilmu-ilmu murni dan ilmu terapan pada fakultas eksakta. Namun secara pasti belum ada hasil penelitian mengenai penggunaan pendekatan tersebut.

Suatu hal yang menarik dan patut dicatat adalah terkait dengan adanya model *team teaching* pada satu mata kuliah, oleh dosen yang satu rumpun. Jika model *team teaching* ini dihubungkan dengan misi integrasi ilmu tampaknya juga masih mengandung sejumlah permasalahan. Idealnya sebuah *team teaching* dalam kerangka integrasi ilmu mesti melibatkan dosen dalam beberapa disiplin yang berbeda namun berdekatan dan saling membutuhkan, serta tampil mengajar bersama-sama. Misalnya untuk mata kuliah fikih tentang bab perdagangan (*al-tijarah*) misalnya bukan hanya dosen fikih yang memahami dalil normatif, kaidah-kaidah dan prinsip Islam tentang perdagangan secara Islami, melainkan juga ada dosen yang mengerti tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro, pesaranan akunting dan sebagainya. Faktanya yang terjadi, *team teaching* tersebut masih dalam satu rumpun ilmu, dan mengajar dalam waktu yang tidak bersama-sama. Keadaan *team teaching* ini masih terjadi pada mata kuliah pendidikan Islam. Tiga dosen yang ada dalam *teaching* tersebut semuanya dosen tentang pendidikan Islam, namun beda dalam konsentrasinya, yakni dosen penelitian pendidikan, dosen falsafah pendidikan dan dosen manajemen pendidikan. Idealnya adalah dosen pendidikan Islam, dosen pendidikan umum, dengan dosen sosiologi atau lainnya. Dengan demikian, misi integrasi ilmu melalui *teaching* ini pun belum berhasil membangun integrasi ilmu, baru berhasil pada upaya saling memperkaya wawasan tentang hal yang sama, serta menghindarkan kejenuhan bagi dosen dan mahasiswa.

Keempat, integrasi ilmu dan bahan ajar. Jika pada masa semasih sekolah tinggi dan institut misi integrasi ilmu dilakukan dengan cara memberikan mata kuliah ilmu umum pada mahasiswa program studi keagamaan, atau memberikan mata kuliah agama pada mahasiswa program studi umum, maka pada masa universitas idealnya bukan hanya seperti itu, melainkan lebih dalam lagi, yakni sudah memasuki wilayah ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu. Namun faktanya upaya yang ideal ini belum dapat diwujudkan. Ilmu agama dan ilmu umum yang diberikan kepada mahasiswa sifatnya yang menurut istilah H. M. Quraish Shihab baru disandingkan, dan belum bertegur sapa, belum bersinergi, belum berkolaborasi antara satu dan lainnya.

Upaya integrasi ilmu yang digagas sejumlah pakar pada sejumlah UIN baru berhenti pada sekedar wacana atau konsep, namun belum masuk pada tahap implementasinya. Dalam Marwan Saridjo, (ed.) (2009: 261-328) *Mereka Bicara Pendidikan Islam* dijumpai gagasan integrasi ilmu dari M. Amin Abdullah (Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), Imam Suprayogo (Mantan Rektor UIN Malik Ibrahim Malang), dan Nanat Fatah Natsir (Mantan Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Bandung). M. Amin Abdullah

membawa ide integrasi Ilmu melalui konsep interkoneksi fungsional atau jaring laba-laba, di mana semua rumpun ilmu: agama, sosial, sains, filsafat, tasawuf dan humaniora sama-sama diperintah Tuhan untuk dibangun dan dikembangkan, dan antara satu ilmu dan ilmu lainnya memiliki hubungan fungsional. Sedangkan Imam Suprayogo membawa ide integrasi ilmu melalui konsep metafora pohon. Ilmu-ilmu tersebut berbeda fungsinya namun saling berkaitan. Ada ilmu yang berfungsi sebagai akar, batang, dahan, dan ranting, sedangkan buahnya adalah kebudayaan dan peradaban. Sedangkan pupuknya adalah budaya dan tradisi akademik serta lingkungan sosial kampus yang kondusif.

Sementara itu, Nanat Fatah Natsir membawa ide integrasi ilmu melalui konsep metafora roda. Yaitu ada ilmu yang berperan sebagai as, jari-jari dan feleg, yang didasarkan pada integrasi iman memandu ilmu, ilmu memandu amal, dan hasilnya kebudayaan dan peradaban. Sementara itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, agenda integrasi ilmu melalui dua acara. *Pertama*, ada integrasi ilmu yang digagas secara perorangan, antara lain oleh Atho Mudzhar, Azyumardi Azra, Mulyadhi Kartanegara, Abuddin Nata, Masykuri Abdullah, Suwito, Armai Arief dan lainnya melalui artikel dan buku yang ditulisnya. *Kedua*, ada integrasi ilmu yang dituangkan dalam Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Nomor 68 Tahun 2018 tentang integrasi ilmu. Atho Mudhar misalnya membagi ilmu menjadi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, humaniora, ilmu formal dan ilmu terapan. Masing-masing ilmu tersebut bukan disatukan atau dileburkan, melainkan saling berinteraksi, bertegur sapa dan saling memberi perspektif. Demikian pula Azyumardi Azra pada dasarnya sejalan dengan gagasan Atho Mudzhar, namun ditekankan dengan mengubah pandangan ilmu sebagai ada yang *fardu ain* atau *fardu kifayah* sebagaimana digagas Imam al-Ghazali, melainkan semua ilmu itu sejajar dan semua wajib dipelajari. Mempelajari ilmu kedokteran dan Kesehatan misalnya adalah sama dengan mempelajari ilmu agama.

Sementara itu Mulyadhi Kartanegara (2005) menulis buku *Integrasi Ilmu sebuah Rekonstruksi Holistik* memberikan landasan ontologis, epistemologi dan aksiologi pada semua ilmu yang berbasis pada konsep tauhid dalam pandangan filosofis dan sufistik yang pada intinya memandang bahwa yang fisik dan metafisik sebagai sesuatu yang esensial dan real dan merupakan kebenaran ilmiah. Hasil Riset *bayani* dan *irfani* yang berbasis wahyu dan ilham sama kuatnya dengan hasil riset burhani (observasi) dan *ijbari* (eksperimen) sebagaimana yang digunakan dalam pengembangan sains. Selanjutnya Abuddin Nata, Suwito, Masykuri Abdillah, dan Armai Arief (2003) dalam *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum* selain memberikan tinjauan normatif teologis, historis dan filosofis tentang integrasi ilmu, juga menggambarkan model reintegrasi ilmu-ilmu agama di masa sekarang. Lebih lanjut Abuddin Nata melalui bukunya *Islam & ilmu Pengetahuan* (2018) antara lain juga membahas tauhid sebagai dasar integrasi ilmu, serta aspek ontologis, epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan, serta contoh-contoh integrasi ilmu. Selanjutnya di dalam Keputusan Rektor tentang Integrasi Ilmu selain dikemukakan

pembagian ilmu (ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu formal dan ilmu terapan) juga dijelaskan Langkah-langkah dalam melakukan integrasi ilmu agama dengan berbagai macam ilmu tersebut.

Selain itu masih ada konsep integrasi ilmu yang dikembangkan para pakar di berbagai PTN lainnya di Indonesia yang tidak dapat disebutkan di sini. Namun intinya bahwa semangat respons untuk menawarkan sebuah gagasan tentang integrasi ilmu tumbuh dengan subur. Hal ini selain sebagai akibat adanya kemampuan yang luar biasa dari para pakar di UIN, juga didorong oleh keinginan menyatakan, bahwa integrasi ilmu penting dan mendesak serta amanat transformasi IAIN menjadi UIN. Namun demikian dalam realisasinya, berbagai konsep tersebut dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya sebagaimana digambarkan dalam kurikulum dan bahan ajar yang digunakan di UIN. Integrasi ilmu dalam arti saling memberi perspektif terjadi pada penelitian dan penulisan tesis dan disertasi pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Melalui Program Studi Kajian yang bersifat lintas disiplin, SPs UIN Jakarta menerima seluruh mahasiswa dari beragam disiplin ilmu, seperti sosial, ekonomi, politik, psikologi, pendidikan, kedokteran, kesehatan dan sebagainya, namun ketika menulis disertasi mereka harus memberikan perspektif Islam pada kajiannya itu.

Kelima, pengembangan dan perubahan kelembagaan PTAIN juga disertai dengan adanya pengembangan infrastruktur, sarana prasana, fasilitas, manajemen, keuangan dan lain sebagainya. Dari segi area kampung, gedung, akses jalan, dan lainnya sudah jauh berubah dan berbeda dengan masa sebelumnya. Saat ini banyak kampus PTIN yang memiliki lahan tanah ratusan hektar, berada di dekat kota, gedung-gedung yang baru, megah, membanggakan, dengan arsitektur modern yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Di dalamnya dilengkapi dengan perpustakaan dan koleksi bacaan yang makin berkembang dalam bentuk buku cetak dan buku elektronik; beragam laboratorium sesuai Program Studi, gedung dan peralatan praktikum sesuai Program Studi, Pusat-pusat studi, gedung pendukung bidang pelayanan administrasi/keuangan, kemahasiswaan, kerja sama, bantuan hukum, pelayanan informasi dan jaringan, *training center*, tempat peribadatan, gedung dan peralatan Seni Budaya, dan lain sebagainya. Dalam bidang manajemen sudah menerapkan Strategi manajemen yang menekankan keunggulan yang berdaya saing serta memuaskan pelanggan. Dalam bidang pengelolaan keuangan sudah mengacu kepada Konsep Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai ketentuan yang berlaku, dan berdampak pada pemberian kesejahteraan berupa remunerasi, dan sebagainya. Namun demikian, banyaknya infrastruktur, sarana dan fasilitas ini belum dibarengi dengan peningkatan budaya dan etos kerja yang unggul, sehingga secara akademik mutunya masih belum mampu menjadi yang terunggul dibandingkan perguruan tinggi umum terkemuka di dalam dan luar negeri.

Keenam, pengembangan dan perubahan PTIN juga terjadi pada bidang kerja sama dan rekognisi ilmiah yang bukan saja mencapai tarap nasional, bahkan juga internasional. Sudah terdapat ratusan Memorandum of Understanding (MoU) antara PTAIN dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga jasa keuangan, perbankan, kepemudaan, dan berbagai hal lainnya. Bersamaan dengan banyaknya kelas program internasional dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa asing, Arab dan Inggris menyebabkan banyak mahasiswa dan dosen dari mancanegara yang menimba ilmu di PTAIN. Mereka itu berasal dari negara di kawasan ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Korea dan Filipina; dari negara-negara Timur Tengah seperti Sudan, Mesir, Saudi Arabia dan Bahrain; ada pula yang berasal dari Afrika Selatan, Maroko, Turki, Libiya, dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, terdapat pula sejumlah Program Studi yang mendapat akreditasi bertarap internasional, seperti dari AUN-QA (*Asean University Networking-Quality Assurance*).

Namun demikian, sejumlah kerja sama tersebut pada umumnya kurang berjalan sebagaimana dikehendaki, yang antara lain disebabkan karena tidak ditindak-lanjuti dengan program kerja tahunan (PKT) yang lebih real. Kesulitan tindak lanjut ini juga antara lain disebabkan karena perbedaan tata kelola dan sistem penganggaran, penetapan agenda yang dianggap urgen dan mendesak serta karena belum terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Selanjutnya terkait dengan mahasiswa mancanegara yang kuliah, pada umumnya mereka berasal dari kelompok masyarakat Muslim kelas menengah ke bawah di negerinya yang secara ekonomi memerlukan bantuan dari Pemerintah Indonesia, seperti Mahasiswa dari Afrika Selatan, Nigeria dan sebagainya. Kendala lainnya mereka pada umumnya juga kurang aktif dalam mengikuti perkuliahan sebagai akibat dari adanya para dosen yang kurang terlatih dalam melayani mereka dalam pembelajaran dengan menggunakan bahasa asing, serta keengganan mereka untuk belajar bahasa Indonesia.

IV. Berbagai Kendala

Terdapat sejumlah hal yang dapat dipandang sebagai hambatan atau kendala dalam mewujudkan visi global dan integratif dari PTAIN. Kendala ini sebagian ada yang bersifat birokrasi, kultural, psikologis. Hambatan yang bersifat birokrasi antara lain adanya aturan yang terlalu ketat dalam bidang keuangan, terutama pada PTN yang masih menggunakan sistem keuangan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Menurut sistem keuangan ini, bahwa semua SPP (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) yang berasal dari masyarakat harus disetor ke negara sebagai penerimaan negara non pajak. Setelah uang tersebut dipotong, lalu dikeluarkan lagi dengan menggunakan sistem DIPA (Daftar Isian Program dan Anggaran) yang waktunya bisa terlambat hingga tiga atau

empat bulan. Dalam keadaan demikian, PTAIN yang bersangkutan di samping menerima anggaran yang jumlahnya kecil juga sering mengalami kelangkaan dana. Sementara itu PTAIN yang sudah menerapkan sistem keuangan BLU juga tidak sepenuhnya leluasa. Walaupun SPP tersebut tidak disetor ke kas negara, namun harus menggunakan rekening Rektor yang nomornya diatur oleh Kementerian Keuangan, dan penggunaannya juga harus menggunakan tarif dan diotorisasi oleh Dirjen Keuangan. Disarankan agar peraturan keuangan di PTAIN harus bersifat non profit, nirlaba, fleksibel dan otonom, dan tidak terlalu birokratis serta sejalan dengan karakter Perguruan Tinggi. Terkait dengan kendala keuangan ini, perguruan tinggi berupaya untuk menerapkan PTN Badan Hukum, sebagaimana yang dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi umum, seperti UGM, ITB, UI, UPI dan IPB. Di antara PTAIN yang kini tengah merintis menerapkan konsep PTN BH adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Namun menurut informasi dari sejumlah perguruan tinggi yang menerapkan PTN BH, ternyata otonomi dan fleksibilitas pengelolaan dana juga masih belum diberikan sepenuhnya. Dana yang berasal dari SPP misalnya ternyata masih diaudit oleh BPK, dengan alasan, karena dana SPP tersebut berasal dari aset milik negara, padahal aset tersebut dalam sistem PTN BH sudah dipisahkan dari aset negara, kecuali tanah.

Hal lainnya yang merupakan kendala adalah hal yang bersifat kultural. Keberadaan PTAIN di setiap daerah amat dipengaruhi oleh kondisi kultural daerah tersebut. Pada masyarakat Jakarta yang dinamis, rasional, egaliter dan terbuka menyebabkan karakter kultural PTIN juga demikian. Sebaliknya pada masyarakat yang cenderung normatif, dikotomi, feodal, dan tertutup menyebabkan karakter PTAIN juga demikian. Fakta ini antara dijelaskan oleh Fuad Jabali dan Jamhari (2003) dalam *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia* mengatakan:

Makin banyak perguruan tinggi makin banyak orang yang bisa melanjutkan pendidikan. Tapi begitu IAIN menyebar ke kota-kota kecil bahkan sampai ke desa-desa kultur *cosmopolit* yang hendak diciptakan para pendiri lembaga ini berangsur pudar. Masuknya anak-anak masyarakat petani ke IAIN membuat IAIN baik secara *geographis* maupun kultural marginal. Pada tahun 1970-an, tantangan ini dijawab seorang lulusan McGill, Mukti Ali. Secara sistematis dia berusaha mengembalikan IAIN ke cita-cita pendiri semula. Di antara keputusan penting yang diambil dalam rangka menumbuhkan kembali budaya urban adalah menutup sebagian besar IAIN yang ada di tempat-tempat terpencil. Dengan keputusan yang dia keluarkan pada tahun 1975, dari 112 IAIN hanya 13 yang diberi izin beroperasi dan ke-13 IAIN itu berada di kota provinsi. Sedangkan pembenahan mutu kajian dilakukan melalui pengiriman dosen ke negara-negara Barat. Hingga tahun 1972, berarti hanya setahun setelah dia diangkat jadi Menteri, jumlah dosen AIN dan pejabat Departemen Agama yang dikirim ke luar negeri sekitar 55 orang. DI IAIN Jakarta pada periode 1973-1978 tercatat beberapa orang telah dikirim untuk melanjutkan studi

mereka, yaitu antara lain: Australia 6 orang, Inggris 2 orang, Mesir, 2 orang, Sudan 2 orang, Kanada 9 orang, Singapura 1 orang, Belanda 8 orang. DI AIN Yogyakarta pada tahun 1973 beberapa dosen dikirim, selain untuk melakukan studi banding meninjau pusat-pusat bahasa di Amerika, Kanada, Eropa dan Asia.

Melalui sumber daya manusia (SDM) yang unggul inilah PTAIN secara bertahap namun pasti dan terukur dapat meningkatkan mutunya menjadi sejajar dengan perguruan tinggi yang unggul di dalam dan luar negeri. Namun sayang, program studi lanjut yang diinisiasi oleh pemerintah saat ini semakin berkurang atau tidak ada lagi. Melanjutkan studi ke luar negeri saat ini lebih diinisiasi oleh dosen sendiri dengan memanfaatkan dana pendidikan yang disediakan pemerintah, seperti LPDP (Lembaga Penyedia Dana Pendidikan) dan dana dari negara donor lainnya. Kesemarakannya para dosen serta minatnya untuk studi ke luar negeri saat ini, terlebih lagi di era Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir satu tahun ini semakin tidak berjalan.

Kendala lainnya yang bersifat kultural psikologis antara lain terlihat pada sikap mental yang belum sepenuhnya urban, kosmopolit dan global. Sikap mental sebagai *the best, the excellent* dan sebagai *the winner* atau sebagai jawara masih belum tumbuh secara merata. Masih ada sikap mental sebagai pecundang, merasa kalah sebelum bersaing, tidak mau keluar dari kebiasaan lama, tidak berani berinovasi, dan merasa kecil dan lokal. Sikap mental sebagai universitas masih belum tumbuh secara merata. Akibatnya agenda dan program yang dibuat masih bersifat lokal, dan recehan. Inilah yang ditangkap oleh (alm) H. A. Malik Fadjar ketika ia mengatakan, bahwa perubahan IAIN menjadi UIN hendaknya tidak hanya berubah namanya saja, melainkan harus disertai dengan sikap mental dan budaya global. Hal ini sejalan dengan sikap mental Islami yang bertujuan memberi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*) (Q. S. al-Ambiya, 21:107). Dengan sikap mental dan budaya ini, diikuti dan dituangkan dalam agenda-agenda dan program-programnya yang besar dan strategis. Terkait dengan ini, maka harus dimulai dengan perubahan sikap mental, budaya dan wawasan.

V. Capaian

Terdapat sejumlah indikator yang menggambarkan capaian yang dihasilkan oleh kerja keras para pendiri, pengembang, pimpinan dan Pembina PTAIN. Mulai dari Presiden, para Menteri, para tokoh penggagas, pimpinan, sivitas akademika serta semua pihak lainnya. Capaian tersebut antara lain dihasilkan sejumlah lulusannya yang mampu memperbaikinya menjadi kelas menengah elite. Dengan pendidikan yang dimilikinya dipadukan dengan pengalamannya dalam bidang kepemimpinan dan lainnya menyebabkan mereka dapat menduduki posisi-posisi strategis di legislatif (Ketua dan anggota Parlemen), eksekutif (menjadi Menteri, dan Pejabat Tinggi lainnya dan yudikatif (para Ketua dan anggota Hakim Agung), menjadi tokoh nasional dan internasional yang disegani, serta berbagai profesi dan pekerjaan lainnya di masyarakat, seperti menjadi

ulama atau Kyai yang mendirikan dan memimpin pondok pesantren, madrasah, perguruan dan perguruan tinggi, menjadi khatib, guru, dosen, dai/mubalighah terkenal, penulis buku, wartawan, pengusaha yang sukses dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengamatan secara random, saat ini dengan mudah para lulusan PTAIN dapat dijumpai di mana saja dalam beragam tugas dan profesi. Hal ini sebagai akibat dari beragamnya keahlian para lulusan PTAIN yang dihasilkan. Singkat kata, tamatan PTAIN itu dapat berbicara dan bekerja apa saja. Hal ini sesuai dengan ajaran al-Qur'an yang berbicara semua bidang kehidupan manusia, dan memandangnya sebagai ibadah kepada Allah SWT. Secara nasional dan internasional misalnya PTAIN berhasil melahirkan tokoh seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang gagasan dan pemikirannya tentang hubungan Islam dengan keindonesiaan, kemanusiaan, dan kemodernan, penegakkan hak-hak asasi manusia, moderasi dan toleransi beragama, dan lainnya masih dijadikan model dan rujukan secara nasional dan internasional. Demikian pula gagasan dan pemikiran Azyumardi Azra tentang Islam dan penegakkan demokrasi, Islam Nusantara, Islam *wasathiyah*, transformasi nilai-nilai agama sebagai landasan moral, etika dan spiritual, kerja sama umat dan lain sebagainya masih dijadikan rujukan di berbagai negara di dunia. Bukunya yang berjudul Jaringan Ulama Nusantara dengan Timur Tengah (al-Haramain) khususnya abad ke-17 dan 18 M, yang semula berbahasa Inggris telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Arab, bahasa Indonesia dan dijadikan rujukan pada berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Demikian pula kiprah Din Syamsuddin yang berhasil memimpin organisasi terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyebabkan ia banyak dipercaya oleh Pemerintah untuk menjadi utusan Pemerintah mewakili Indonesia untuk berbicara di forum-forum internasional. Demikian pula nama tokoh lainnya dalam bidang agama, seperti H. M. Quraish Shihab yang tampil sebagai ulama yang disegani dan dikenal sebagai ahli tafsir tamatan terbaik dari Universitas Al-Azhar se Asia Tenggara. Jumlah ini masih dapat ditambah dengan sejumlah tokoh yang duduk sebagai Ketua dan Anggota DPR/MPR, memimpin lembaga tingkat nasional, dan lain sebagainya. Sebuah buku *Islam & Transformasi Indonesia* yang diterbitkan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019) misalnya telah merekam gagasan dan pemikiran para alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang penguatan nilai dan mutu pendidikan, pembinaan generasi masa depan, transformasi masyarakat, ekonomi umat, penegakkan hukum, umat *wasathiyah*, kesalehan politik, dan lain sebagainya. Alumni UIN "Tak Ada Matinya" dan prospeknya di masa depan amat cerah.

Melalui peran, fungsi, tugas, kiprah dan usaha-usaha yang dilakukan alumni PTAIN bersama para alumni dari perguruan tinggi lain serta segenap komponen bangsa lainnya, saat ini telah terjadi transformasi dalam segala aspek kehidupan atas dasar jiwa dan ruh agama. Dalam bidang pendidikan saat ini telah tumbuh lembaga pendidikan Islam mulai

dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang menjadi pilihan utama masyarakat dan keberadaannya tidak hanya di pedesaan melainkan di juga perkotaannya. Dalam bidang ekonomi saat ini telah tumbuh ekonomi berbasis Syari'ah yang diprediksi akan menjadi ekonomi alternatif dan pilihan masyarakat. Dalam bidang keagamaan telah tumbuh dan berkembang masjid-masjid dengan program dan manajemen yang baik.

Dalam bidang dakwah telah berhasil menumbuhkan suasana masyarakat yang makin religius yang ditandai oleh kesemarakan dalam melaksanakan ibadah, jumlah jamaah shalat berjamaah di masjid makin penuh, peminat yang melaksanakan ibadah haji dan umrah makin meningkat; jumlah pembayar zakat, infak, sedekah, hibah wakaf dan lainnya meningkat. Demikian pula perkembangan dalam bidang pengembangan intelektual, seperti penerbitan buku, tulisan artikel di surat kabar, Jurnal terakreditasi nasional dan internasional meningkat, dan lainnya semakin meningkat. Demikian pula ketaatan melaksanakan ketentuan syariat Islam dalam bidang makanan, minuman, fashion, seni, budaya dan lainnya sudah semakin berlandaskan moral dan etika agama.

Selain itu hal yang dicatat sejarah dan menjadi kebanggaan pemerintah terhadap kehadiran PTAIN adalah tentang peran dan kontribusinya dalam membangun, mengembangkan dan memasyarakatkan paham wawasan Islam *wasathiyah* yang menurut Azyumardi Azra (2020) dalam *Relevansi Islam Wasathiyah* adalah Islam yang *tawasuth* (tengah), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleran), *islah* (reformis), *ta'awun* (tolong menolong/gotong royong), *syura/musyawaharah* (konsultasi), *muwathanah* (cinta tanah air), *musawa* (setara), dan *qudwah* (teladan). Demikian pula berbagai tulisan Komaruddin Hidayat dalam bentuk artikel dan buku banyak berbicara tentang moderasi beragama. Peran PTAIN dalam membangun dan mengembangkan Islam moderat ini telah diakui Pemerintah dari sejak awal kelahirannya. Harun Nasution, dengan bukunya *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* yang diajarkan kepada para mahasiswa di tahun 70-an hingga 80-an tercatat sebagai usaha yang efektif dalam melahirkan wawasan Islam yang luas, moderat, toleran, dan rasional yang mengimbangi bahkan menggeser paham Islam yang sempit, ekstrem, eksklusif, normatif dan doktrinal dan dikotomi yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran.

Peran dan fungsi yang dimainkan alumni PTAIN itu menggambarkan telah terjadinya peran stransformatif PTAIN dalam membawa kemajuan umat, bangsa dan negara. Peran dan fungsi inilah yang dicita-citakan para pendiri, pembangun dan pengembang PTAIN. Melalui peran dan fungsi ini, maka peran strategis Islam dalam mewujudkan perataan keadilan dan kesejahteraan sebagian besar telah dilakukan oleh PTAIN.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa kehadiran PTAIN di

Indonesia merupakan hasil kerja keras segenap pemimpin umat Islam dari kalangan modernis dan tradisional yang tercerahkan serta adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah dalam hal ini Presiden RI, Menteri Agama serta komponen bangsa lainnya baik di legislatif, eksekutif maupun lainnya. Melalui PTAIN telah terjadi mobilitas vertikal dan horizontal bagi masyarakat muslim perdesaan, sehingga dapat mengubah nasibnya sejajar dengan komponen masyarakat Indonesia lainnya.

Kedua, bahwa dari sejak berdirinya telah terjadi pengumpulan fungsi transformatif PTAIN, yakni selain mengembang fungsi dakwah (menyebarkan-luaskan ajaran Islam) juga fungsi pengembangan keilmuan Islam, fungsi integrasi ilmu agama dan ilmu umum, fungsi kemasyarakatan, fungsi pengembangan kebudayaan dan peradaban, dan lain sebagainya. Melalui fungsi-fungsi ini, Islam tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam sendiri, melainkan bagi masyarakat, bangsa, negara bahkan dunia. Fungsi-fungsi ini terus dijaga, dipelihara, dikembangkan dan dilaksanakan dari sejak berdirinya di tahun 50-an hingga sekarang.

Ketiga, bahwa dalam melaksanakan peran transformatifnya, PTAIN ini harus melakukan konsolidasi baik secara internal maupun internal. Berbagai perbedaan dan dinamika internal pada umumnya dapat dikonsolidasikan dengan baik, hingga PTAIN telah tampil sebagai wadah pemersatu keragaman keagamaan Islam. Sedangkan perbedaan dan dinamika eksternal baik secara ideologis maupun politis telah pula dapat dikonsolidasikan sehingga secara bertahap dukungan pemerintah dan berbagai kekuatan eksternal lainnya dapat dilakukan.

Keempat, bahwa melalui transformasi perguruan tinggi Islam yang berjalan secara dinamis dan berkelanjutan telah memberi dampak positif bagi terjadinya transformasi ajaran Islam dalam rangka membangun ilmu, kebudayaan dan peradaban yang Islam dengan tetap sejalan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui cara ini PTAIN telah memainkan peranan dan mewujudkan misi strategis ajaran Islam memberi rahmat bagi seluruh alam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1998). *Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Kerjasama INIS, PPIM dan Balitbang Departemen Agama/Kementerian Agama Ri.
- Azra, A. (Ed.). (1989). *Perspektif Islam di Asia Tenggara*.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2020). *Relevansi Islam Wasathiyah dari Melindungi Kampus hingga Mengaktualisasi Kesalehan*. Jakarta:Kompas.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1970). *An Indonesian-English Dictionary*. Bhratara.
- Ismatu Ropi, T. D. S. (2001). *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*. Logos Wacana Ilmu.
- Jabali, F. & Jamhari. (2003). *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia*. UIN Jakarta Press.

- Kartanegara, R. M. (2005). *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*. UIN Jakarta Press.
- Mapuna, H. D. (2005). *Dulu IAIN Kini UIN Alauddin*. Makassar:Alauddin Press.
- Nata, A. (2012). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nata, A., Masykuri, A., & Arief. (2003). *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*. UIN Jakarta Press.
- Saridjo, M. (Ed.). (2009). *Mereka Bicara Pendidikan Islam sebuah Bunga Rampai*. RajaGrafindo Persada.
- Siradj, A. Z. (2019). *Islam & Transformasi Indonesia*. Kerjasama IKALUIN Jakarta & Penerbit Penjuru Ilmu.